



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1864-1876

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Kerja *Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU)* dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020

Rizka Kumala Sari¹✉, Umi Oktyari Retnaningsih², Yusnarida Eka Nizmi³

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: rizka.kumala@grad.unri.ac.id¹✉

Abstrak

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa perkawinan anak mengacu pada perkawinan yang dilakukan antara anak yang masih berada dibawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)* menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT (*The Australian Department of Foreign Affairs & Trade*) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan salah satunya mengurangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk didalamnya isu perkawinan anak dengan mendukung strategi nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Menggunakan teknik analisis dokumen (*document analysis*) dengan cara mencari data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan serta menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja *Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU)* dalam mengurangi angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020. Terlepas adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan anak, pelaksanaan program kerja MAMPU dalam mengurangi angka perkawinan anak tetap berjalan dengan melibatkan pemangku kebijakan, masyarakat dan para mitra yang terlibat.

Kata Kunci: *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU), Kerjasama Internasional, Perkawinan Anak.*

Abstract

The practice of child marriage is a form of violation of human rights. Almost all countries in the world agree that child marriage refers to marriages carried out between children under the age of 18 and adults or other children. Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) is one of the collaborations between the Australian government - DFAT (The Australian Department of Foreign Affairs & Trade) and the Indonesian government - BAPPENAS which aims to reduce violence against women, including child marriage by supporting the government's national strategy in an effort to reduce marriage rates children in Indonesia. Using document analysis techniques by searching for data using written sources that reflect the use of synchronous language. The author uses a descriptive qualitative approach that aims to produce a systematic and in-depth description of how the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU) work program is implemented in reducing child marriage rates in Indonesia 2018-2020. Despite differing views on child marriage, the implementation of the Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) work program in reducing child marriage rates is still ongoing by involving policymakers, communities, and partners involved.

Keywords: Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU), Child Marriage, International Cooperation

PENDAHULUAN

Perkawinan anak menjadi salah satu praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang mengancam kehidupan, kesejahteraan dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa perkawinan anak mengacu pada perkawinan yang dilakukan antara anak yang masih berada dibawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) berupaya untuk melindungi jutaan anak perempuan dan mengakhiri praktik perkawinan anak pada tahun 2030 serta melindungi hak anak perempuan dengan kondisi rentan di seluruh dunia. Bahkan UNICEF dan UNFPA berupaya dalam mencegah adanya praktik perkawinan anak dan mendukung anak perempuan korban perkawinan anak di 12 negara di dunia, termasuk Afrika, Asia dan Timur Tengah yang merupakan negara dengan tingkatan perkawinan anak paling tinggi (United Nations, 2022)

Di Indonesia, praktik perkawinan anak bukan merupakan hal yang baru dan sama dengan negara lainnya, bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban dengan latar belakang yang kerap terjadi pada keluarga kurang mampu, tidak mendapatkan hak pendidikan serta kentalnya budaya patriarki yang masih diterapkan. Perkawinan anak di Indonesia masih dinilai sangat tinggi, padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat diizinkan apabila usia laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan sudah berumur 19 tahun.

Kerjasama internasional dalam menangani perkawinan anak di Indonesia dinilai penting, yang mana perkawinan anak merupakan isu bersama *dalam Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (Bachtiar, 2021), sehingga kerjasama internasional ataupun membangun mitra dengan negara lain merupakan salah satu jalan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)* menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT (*The Australian Department of Foreign Affairs & Trade*) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan dalam mendukung organisasi masyarakat madani untuk mendorong reformasi kebijakan dan memperbaiki akses perempuan miskin ke pelayanan dan program pemerintah dalam; perlindungan sosial, kondisi pekerjaan (termasuk pekerja migran di luar negeri), kesehatan dan nutrisi, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Bappenas, 2022).

Dalam hal ini program MAMPU bertujuan untuk mendukung strategi nasional pemerintah dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan ini pun dilakukan dengan cara bekerjasama dengan mitra-mitra pelaksana yang berada dalam isu pencegahan perkawinan anak seperti, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Bakti, Konsorsium Permampu, Yayasan PUPA Bengkulu, dan Yayasan Pekka yang tersebar di lebih dari 90 kabupaten dan kota, 700 desa di 26 provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan salah satunya kampanye digital bertajuk #MAMPUBeraniBersikap (Marsyaf, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative reseacrh*) dengan model deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis data yang dikumpulkan serta disusun dengan memperhatikan dan meneliti beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena dan kondisi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah teknik analisis dokumen (*document analysis*) yang merupakan pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa sinkronis (Subroto, 1992). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan program kerja *Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU)* dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2018 – 2020.

Penulis juga menetapkan batasan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program kerja *Australia – Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU)* dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia dan Australia menjadi salah satu fenomena yang menarik pada isu hubungan internasional, baik secara bahasa, agama, etnis, populasi bahkan juga mempunyai perbedaan cara sistem politik, hukum dan sosial. Australia termasuk negara yang banyak memberikan bantuan luar negeri dengan jumlah yang besar khususnya pada negara-negara kawasan Asia Pasifik (Rivaldy, 2020). Termasuk didalamnya dukungan pada pembangunan berkelanjutan, keamanan-pertahanan, pengembangan sistem hukum serta manajemen perekonomian, juga memberikan dukungan bantuan luar negeri dalam kasus perkawinan anak yang diberikan kepada luar negaranya dalam bentuk membuat kerjasama antar pemerintah dengan membuat berbagai program dengan tujuan pemberdayaan perempuan.

Praktik perkawinan anak banyak terjadi di seluruh belahan dunia dan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan anak menjadi sebuah masalah global dengan angka bervariasi, baik dari segi perbandingan maupun jumlah, sebagian besar perkawinan anak terjadi di kawasan pedesaan Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan (WHO, 2022). Di Indonesia, praktik perkawinan anak bukan merupakan hal yang baru, anak perempuan banyak menjadi korban dengan latar belakang yang kerap terjadi pada keluarga kurang mampu, kurang bahkan tidak mendapatkan hak pendidikan serta budaya lama yang masih diterapkan. Padahal Indonesia mempunyai ketetapan bahwasanya anak merupakan seseorang yang usianya masih dibawah 18 tahun bahkan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Namun, adapun upaya pemerintahan Indonesia terkait isu perkawinan anak di Indonesia tentunya bertujuan dalam menurunkan angka akurat dan juga implementasi dari strategi yang ditentukan lewat kerjasama dari berbagai pihak terkait.

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) menjadi salah satu kerjasama antara pemerintah Australia - DFAT (*The Australian Department of Foreign Affairs & Trade*) dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS yang bertujuan dalam mendukung organisasi masyarakat madani untuk mendorong reformasi kebijakan dan memperbaiki akses perempuan miskin ke pelayanan dan program pemerintah dalam; perlindungan sosial, kondisi pekerjaan (termasuk pekerja migran di luar negeri), kesehatan dan nutrisi, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Kedutaan Besar Australia – Indonesia, 2022). Perkawinan anak menjadi salah satu isu pada fokus program MAMPU yang termasuk pada poin Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU) didanai oleh pemerintah Australia - DFAT (*The Australian Department of Foreign Affairs & Trade*) dan programnya dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Indonesia – BAPPENAS. Tujuan dari program MAMPU untuk berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan membangun mitra yang berkecimpung pada

kajian gender guna dalam membantu mempengaruhi kebijakan, peraturan dan layanan. Program MAMPU terdiri dari 2 fase, MAMPU Fase I dilaksanakan pada April 2013 – Juni 2016 dan MAMPU Fase II dilaksanakan pada Juli 2016 – Desember 2020 (Australian Government, 2022).

Dalam pelaksanaan di kedua fase ini, didukung oleh pendekatan strategis yang konsisten program MAMPU dirancang sebagai sebuah inisiatif jangka panjang yang tujuannya memanfaatkan kapasitas yang tadinya kurang terlihat pada gerakan perempuan Indonesia dalam mempengaruhi reformasi pemerintah Indonesia. MAMPU memberikan serangkaian hibah, bantuan teknis serta memberikan dukungan kepada seluruh jaringan mitra yang bekerja di lima area tematik, yaitu :

1. Meningkatkan akses pada program perlindungan sosial pemerintah Indonesia
2. Meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja
3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi kerja perempuan ke luar negeri
4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan
5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan (Bappenas, 2022)

Di awal Fase II program MAMPU yaitu pada tahun 2017, adanya perubahan tata kelola yang mana meningkatkan keterlibatan BAPPENAS dan juga membuat ruang baru dalam hubungan antara para mitra program MAMPU dan kementerian – kementerian Indonesia. Salah satu pelaksanaan yang menonjol salah satunya dengan adanya pembentukan kelompok kerja Tematik yang bertujuan membantu mempertemukan para mitra dengan kementerian – kementerian utama guna membahas prioritas kebijakan. Dalam mendukung efesiennya sistem tata kelola dan manajemennya, Sekretariat MAMPU didirikan dan diawasi oleh Kontraktor Pelaksana yaitu Cowater International Inc (Cowater International, 2022).

Pada sistem penyaluran dana hibah telah dibangun dimulai pada Fase I dan dilanjutkan pada Fase II dengan adanya proses penyempurnaan. Hal yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah sistem manajemen hibah yang tepat dan efisien agar memungkinkan sumber daya disalurkan ke berbagai jaringan yang mencakup pada berbagai kapasitas.

Pada pelaksanaannya, seluruh mitra program MAMPU mendapat dukungan penuh dalam mengembangkan program kerja yang bertujuan dalam mendukung Program MAMPU berdasarkan dengan area tematik yang telah ditentukan. Program MAMPU juga mendukung mitra-mitra terkait dalam keterlibatannya pada pelaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs). Beberapa kegiatan dibuat sesuai dengan area tematik yang telah ditentukan oleh para mitra. Antara lain :

Mengenai peningkatan akses pada program perlindungan sosial pemerintah Indonesia, program MAMPU mempunyai tujuan dalam memberikan akses pelayanan perlindungan dari

pemerintah dalam mengupayakan masyarakat terutama perempuan dengan keadaan ekonomi yang rendah untuk dapat memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal perlindungan sosial. Hal ini tentunya didasari karena masih banyaknya masyarakat terutama perempuan dengan keadaan ekonomi yang rendah kurang memiliki wawasan terkait dengan program perlindungan sosial karena masih kurangnya dokumen identitas yang valid dan sah. Adapun program kerja MAMPU dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia dengan cara membentuk dan Menjalin Mitra *Civil Society Organization* (CSO) yang menangani isu perkawinan anak.

Organisasi Masyarakat Sipil/ CSO bertugas dalam mempertemukan dan menjembatani program kerja MAMPU dengan seluruh tingkatan kategori masyarakat. Beberapa diantara mitra program MAMPU berfokus pada salah satu isu pada area tematik lima yaitu mengurangi kekerasan terhadap perempuan termasuk didalamnya isu perkawinan anak, antara lain :

Yayasan Kesehatan Perempuan

Didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2001 oleh para aktivis perempuan yang berfokus mengenai kondisi Kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia, YKP membuat strategi yang sistematis bertujuan pada pemenuhan hak-hak Kesehatan reproduksi perempuan. Perkawinan anak merupakan salah satu isu strategis Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) yang bertujuan dalam memperbaiki dan mengembangkan kebijakan pemerintah mengenai perkawinan anak. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menjadi audiensi dari banyaknya program penyuluhan dan edukasi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintahan setempat yang berperan sebagai pemangku kebijakan yang nantinya penyuluhan tersebut mempunyai dasar dalam membuat aturan daerah terkait dengan perkawinan anak. Adapun beberapa program dijalankan YKP dalam menangani isu perkawinan anak :

1. Creating Spaces

Memberikan penyuluhan atau fasilitator mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPAP) dan perkawinan anak. Terdapat 3 wilayah kerja dalam melaksanakan program ini, yaitu wilayah kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur.

2. NGULI KONCO : Nguber Ilmu Bareng Konco

Membuat sebuah diskusi agar para peserta yang masih dikategorikan remaja atau anak usia dibawah 18 tahun dapat berperan dan berkontribusi sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam mencegah dan mengurangi isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPAP) dan Perkawinan Anak.

3. DISBAREBO: Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro

Mengadakan kegiatan sosialisasi yang membahas isu perkawinan anak dengan fokus pada pencegahan, bahaya dan dampak kekerasan pada remaja.

Kapal Perempuan

Berdiri pada 8 Maret 2000 bertujuan dalam membangun gerakan perempuan dan sosial yang nantinya dapat mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian. Adapun pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan yang berfokus pada isu perkawinan anak antara lain :

1. Gender Watch

Di dalam program MAMPU, KAPAL Perempuan mengembangkan "Gender Watch" sebagai sebuah model pemantauan bersama oleh banyak pihak untuk menjaga perlindungan sosial serta memberi manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan gender, termasuk salah satu fokus ada pada isu pencegahan perkawinan anak. Gender Watch juga membangun "sekolah perempuan" yang menjadi tempat pembelajaran di tingkat Desa ataupun Komunitas. Dalam program MAMPU, sekolah perempuan berjalan di 6 provinsi, 9 kabupaten/ kota dan 25 desa. Selama proses berjalan, Pemerintah Daerah meniru untuk 80 desa (Hanifah, 2022).

2. Radio Komunitas

Radio komunitas diciptakan untuk melakukan kampanye dan pendampingan bagi masyarakat khususnya perempuan dalam mengurangi angka perkawinan anak serta keadilan sosial. Disiarkan di Kabupaten Pangkajene – Sulawesi Selatan dan Lombok Utara, radio disiarkan dengan menghadirkan narasumber pada bidangnya (Siperennu, 2022) . Dengan adanya siaran yang akan didapatkan bahkan didaerah terpencil sekalipun menggunakan satelit radio diharapkan masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan anak serta mengetahui bahwasanya adanya kebijakan pemerintah mengenai perkawinan anak.

Koalisi Perempuan Indonesia

Berdiri tanggal 18 Mei 1998 yang merupakan salah satu bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto. Menjadi salah satu mitra program MAMPU, KPI bekerja di 8 Provinsi, 30 Kabupaten dan 78 Desa/ Kelurahan dengan tujuan meningkatkan akses bagi perempuan dalam mendapatkan hak perlindungan sosial. Adapun pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang berfokus pada isu perkawinan anak antara lain :

1. Balai Perempuan

KPI telah mendirikan Balai Perempuan yang berguna dalam memperkuat kepemimpinan perempuan. Bersama dengan program MAMPU, KPI dapat melakukan advokasi gabungan dalam peraturan dan pendanaan salah satunya bagi Penyertaan kelompok penyandang disabilitas yang secara otomatis terqualifikasi pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk

- mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) (Bappenas, 2022).
2. Gerakan Bersama “STOP Perkawinan Anak”
KPI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan kampanye bersama dalam menghentikan perkawinan anak (Bappenas, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan riset perkawinan anak dan mengeluarkan modul tentang menjadi orang tua dan modul pengasuhan positif serta melakukan Kampanye Stop Perkawinan Anak dengan menggandeng Wahana Visi Indonesia (Wahana, 2022).
 3. Agen Perubahan
Agen perubahan dibentuk untuk membela hak – hak perempuan dan juga kelompok terpinggirkan. Anak – anak rentan dalam mengalami perkawinan anak, maka dari itu KPI secara aktif membentuk agen perubahan dalam merangkul generasi muda untuk ikut mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Selain menjadi konselor bagi anak seusianya, agen perubahan juga dapat memantau dan ikut mensosialisasikan mengenai dampak dari perkawinan anak (Herlinawati, 2022).
 4. Pernyataan Komitmen KPI dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak
KPI berkomitmen untuk melakukan Advokasi dalam mendukung implementasi Undang – undang dan pencegahan perkawinan anak serta membuat pusat informasi, pengaduan dan advokasi pencegahan perkawinan anak (PIPA PPA) di wilayah kerja Koalisi Perempuan Indonesia (Herlinawati, 2022).

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Dimulai tahun 2019, BaKTI bekerja dalam mengumpulkan dan mendistribusikan program bantuan pembangunan untuk Indonesia Timur serta mendukung kolaborasi tokoh dan inisiatif lokal. Program MAMPU mendukung penuh program kerja BaKTI terutama dalam mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dengan cara peningkatan kerjasama dengan parlemen di 85 Desa/ Kelurahan di 5 Provinsi (Bappenas, 2022). Adapun pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh BaKTI yang berfokus pada isu perkawinan anak adalah “Bergerak Bersama Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan” yang menjadi salah satu kegiatan yang bekerjasama dengan salah satunya MAMPU yang juga melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat setempat dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak dan isu perempuan lanjut usia yang terkait dengan rancangan Undang – Undang penghapusan kekerasan seksual.

‘Aisyiyah

Didirikan pada 19 Mei 1917 sebagai organisasi perempuan dibawah naungan Muhammadiyah adalah salah satu mitra program MAMPU. Dalam menjalankan organisasi,

'Aisyiyah memiliki tiga program pokok, antara lain Pemberdayaan, Kesehatan dan Pendidikan (Adrymarthanio, 2022). Adapun pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh 'Aisyiyah yang berfokus pada isu perkawinan anak adalah Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA). Aisyiyah membentuk kelompok perempuan yang dinamakan Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) yang bertujuan sebagai sebuah tempay dalam pemberdayaan komunitas yang didalamnya meliputi pendidikan, konsultasi dan Kesehatan reproduksi.

Berbagai program yang dijalankan para mitra MAMPU, terutama yang mempunyai fokus terhadap isu perkawinan anak tentunya mempunyai respon yang berbeda-beda baik pada pemangku kebijakan dan masyarakat. Beberapa berpandangan bahwasanya mengurangi angka perkawinan anak dengan upaya pencegahan adalah langkah yang baik agar adanya kesadaran dengan berbagai dampak buruk yang akan terjadi apabila melakukan perkawinan anak. Dampak langsung yang akan didapatkan tentunya oleh anak yang melakukan perkawinan, terlebih pada Kesehatannya baik secara fisik, fisiologi dan psikologis serta dampak nya juga akan dirasakan oleh lingkungan sekitar terhadap generasi penerus bangsa. Tidak sedikit yang mendukung dan ikut serta dalam menjalankan berbagai program kegiatan dalam mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia dengan menjadi pelopor dan pelapor. Adanya kesadaran mengenai dampak buruk yang terjadi apabila melakukan perkawinan anak, program kerja bersama para mitra MAMPU ini juga memberikan informasi dan sosialisasi yang benar akan pendampingan baik secara hukum dan sosial mengenai perkawinan anak dengan adanya tempat/ posko pengaduan yang masih dijalankan sampai saat ini.

Adanya pemikiran yang setuju dengan pencegahan perkawinan anak, tentunya ada juga kelompok yang beranggapan bahwa perkawinan anak adalah hal yang biasa terjadi pada budaya patriarki selain daripada alasan keadaan ekonomi. Tradisi atau budaya yang seringkali menuntut kepatuhan anak perempuan terhadap pemikiran orang tua, padahal seharusnya kepatuhan mempunyai batasannya. Terutama apabila hal itu berpotensi merusak masa depan dan menghilangkan hak penuh sebagai warga negara.

Masih adanya pemikiran yang konservatif tersebut tentunya menjadi salah satu kendala bagi para mitra MAMPU dalam menjalankan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan.

SIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkawinan anak di Indonesia merupakan hal yang sudah lama terjadi yang disebabkan beberapa faktor, terutama ekonomi dan budaya. Indonesia mempunyai kebijakan dalam mengurangi dan mencegah perkawinan anak, namun hal itu belum terlihat berhasil dalam menangani isu ini. Kerjasama internasional dalam menangani perkawinan anak di Indonesia dinilai penting, yang mana perkawinan anak

merupakan isu bersama *dalam Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kerjasama internasional yang bangun melalui program kerja *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women Empowerment (MAMPU)* pada area tematik empat dalam poin kekerasan terhadap perempuan yang didalamnya termasuk isu perkawinan anak melakukan kegiatan yang berdampak pada pencegahan dan pengurangan angka perkawinan anak di Indonesia.

Menjalin Mitra *Civil Society Organization (CSO)* menjadi poin dalam pelaksanaan program kerja MAMPU dalam menangani isu perkawinan anak di Indonesia, dari 13 mitra program MAMPU saat ini, terdapat 5 mitra CSO yang pada programnya melaksanakan kegiatan dalam isu perkawinan anak salah satunya melakukan pendampingan, sosialisasi, diskusi dan membuat posko yang menaungi isu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Perkawinan Anak. Dalam pelaksanaan program kerja, tentunya CSO mendapatkan fasilitator dan pendanaan dari program MAMPU. Menjadi Pelapor dan Pelopor yang didapat melalui program kerja MAMPU diharapkan memberikan dampak positif baik untuk pemangku kebijakan, masyarakat dan mitra.

Selain itu program MAMPU juga memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Dari program ini, MAMPU bersama dengan para mitranya berhasil dalam melakukan pendampingan dan melakukan advokasi ke pemerintah setempat, baik tingkat Desa/ Kabupaten/ Provinsi. MAMPU bersama para mitra berhasil melakukan advokasi dalam perubahan batas usia minimal pernikahan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat diizinkan apabila usia laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan sudah berumur 19 tahun. Selain itu MAMPU juga mendorong dibuatnya kebijakan di tingkat Desa/ Kabupaten/ Provinsi mengenai isu perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrymarthanio, Verelladevanka. "Aisyiah: Latar Belakang, Peran, dan Program", <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/04/120000279/aisyiyah-latar-belakang-peran-dan-program?page=all>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- Australian Government – DFAT. "Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment (MAMPU) Phase 2 Independent Strategic Review and management response", <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-partnership-gender-equality-womens-empowerment-mampu-phase-2-ind-strat-review>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. *et al.* "Kerjasama Asing dengan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Copyright @ Rizka Kumala Sari, Umi Okyari Retnaningsih, Yusnarida Eka Nizmi

Sipakalebbe Vol. 5 No. 2 (2021), 166, diakses 29 Januari 2022, doi: <https://doi.org/10.24252/sipakalebbe.v5i2.25812>

Cowater International. "Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment (MAMPU)", <https://www.cowater.com/en/projects-in-action-bimonthly-newsletter-australia-indonesia-partnership-for-gender-equality-and-womens-empowerment-mampu/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

D, Edy Subroto. Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Surakarta : UNS Press, 1992), hlm. 42

Hanifah, Aufa. "Sekolah Perempuan Kembangkan Pemikiran Kritis dan Kepedulian Sosial Perempuan", <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=2347>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Kapal Perempuan. "Gender Watch – MAMPU Program", <http://kapalperempuan.org/wp-content/uploads/2020/02/profil-kapal-mampu-feb20.pdf>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Kapal Perempuan. "Radio Siperennu FM, Suara Perempuan di Pulau pada Masa Pandemi", <https://kapalperempuan.org/radio-siperennu-fm-suara-perempuan-di-pulau-pada-masa-pandemi/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Kedutaan Besar Australia – Indonesia. "Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia", <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022

Koalisi Perempuan Indonesia. "Deklarasi Gerakan Bersama Pemerintah & Masyarakat: STOP Perkawinan Anak!", <https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/11/03/deklarasi-gerakan-bersama-pemerintah-masyarakat-stop-perkawinan-anak/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

Koalisi Perempuan Indonesia. "Pernyataan Komitmen Koalisi Perempuan Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", <https://www.koalisiperempuan.or.id/2019/10/17/ Pernyataan-komitmen-koalisi-perempuan-indonesia-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

Koalisi Perempuan Indonesia. "Sejarah Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi", <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

MAMPU – Bappenas, "Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)", <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/koalisi-perempuan-indonesia-3/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022

- MAMPU – Bappenas, “Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)”, <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/yayasan-bakti-bursa-pengetahuan-kawasan-timur-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- MAMPU – Bappenas. “Area Tematik Program Kami”, <http://mampu.bappenas.go.id/>, diakses pada 29 Januari 2022
- MAMPU – Bappenas. “Project Brief MAMPU: Balai Sakinah ‘Aisyiyah”, <http://mampu.bappenas.go.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-balai-sakinah-aisyiyah/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- MAMPU – Bappenas. “Tentang Mampu”, <http://mampu.bappenas.go.id/tentang-kami/>, diakses pada 29 Januari 2022
- Marsyaf, Muh Iqbal. “MAMPU Kampanye Digital Ajak Anak Indonesia Berani Bersikap”, <https://tekno.sindonews.com/read/170852/207/mampu-kampanye-digital-ajak-anak-indonesia-berani-bersikap-1600610945>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
- Rivaldy, Yusuf. “Melihat Latar Belakang Australia dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 13 No. 3 (Juli – Desember 2020), 185, diakses 29 Januari 2022, doi: <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i2.18738>
- S, Martha Herlinawati. “Koalisi Perempuan: Generasi muda jadi agen hentikan perkawinan anak”, <https://jatim.antaranews.com/rilis-pers/972734/koalisi-perempuan-generasi-muda-jadi-agen-hentikan-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- United Nations. “New UN initiative aims to protect millions of girls from child marriage”, <https://www.un.org/youthenvoy/2016/03/new-un-initiative-aims-to-protect-millions-of-girls-from-child-marriage/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
- Wahana Visi Indonesia, “Lindungi Anak dari Kampanye Digital Perkawinan Anak”, <https://wahanavisi.org/id/media-materi/cerita/detail/lindungi-anak-dari-kampanye-digital-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022
- WHO. “Child marriages-39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020”, <https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020#:~:text=Between%202011%20and%202020%2C%20more,daily%20will%20marry%20too%20young>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022
- Yayasan Kesehatan Perempuan. “Diskusi Bareng Remaja Bojonegoro (DISBAREBO)”, <https://ykp.or.id/diskusi-bareng-remaja-bojonegoro-disbarebo/>, diakses pada

tanggal 11 Februari 2022

Yayasan Kesehatan Perempuan. "NGULI KONCO: Nguber Ilmu Bareng Konco", <https://ykp.or.id/nguli-konco-nguber-ilmu-bareng-konco/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022

Yayasan Kesehatan Perempuan. "Pertemuan YKP dengan PEMDA Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo dan Kab. Blitar untuk Memperkuat Dukungan Pada Isu KTPAP dan PA", <https://ykp.or.id/pertemuan-ykp-dengan-pemda-kab-bojonegoro-kab-ponorogo-dan-kab-blitar-untuk-memperkuat-dukungan-pada-isu-ktpap-dan-pa/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022

Yayasan Kesehatan Perempuan. "Profil", <https://ykp.or.id/profil/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022